



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**Badan Pendapatan
Daerah**

Pemerintah Kabupaten Kotabaru



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Hidayah Nya, Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Substansi Laporan Kinerja Pemerintah ini menginformasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sehubungan dengan kinerja yang telah dicapai, dimana ada keberhasilan yang telah diperoleh maupun kegagalan akibat kendala / hambatan-hambatan yang ditemui dalam masa tahun bersangkutan, serta merupakan bahan untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga diharapkan dimasa atau tahun yang akan datang dapat lebih maksimal dalam pencapaian tujuan, sasaran sesuai dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Akhir kata, diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran sebagai media pertanggung jawaban kinerja organisasi dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin.

Kotabaru, Januari 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru



RONNY HENDRAYADI, SE, M.IP
NIP. 19761010 200901 1 002
Pembina (IV/a)

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Maksud dan Tujuan Pelaporan	1
B. Aspek Strategis	7
C. Kondisi Umum Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	8
D. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Kinerja	10
1. Rencana Strategis	10
2. Strategi dan Arah Kebijakan Umum	10
B. Rencana Kinerja.....	13
Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja SKPD	16
B. Capaian Program dan Kegiatan	20
C. Realisasi Keuangan / Anggaran	21
D. Inovasi	30
BAB IV PENUTUP	32

Lampiran – Lampiran

1. Form E.81 Laporan Evaluasi Program Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru menyusun Laporan Kinerja Pemerintah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2023 dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Laporan Kinerja Pemerintah juga dijadikan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap pemerintah atas penggunaan anggaran dan / atau merupakan pengelolaan sumberdaya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian kinerja yang telah dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan unsur pelaksana bidang administrasi keuangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berperan sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah. Memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan menjalankan fungsi sebagai pendapatan daerah.

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 20), dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

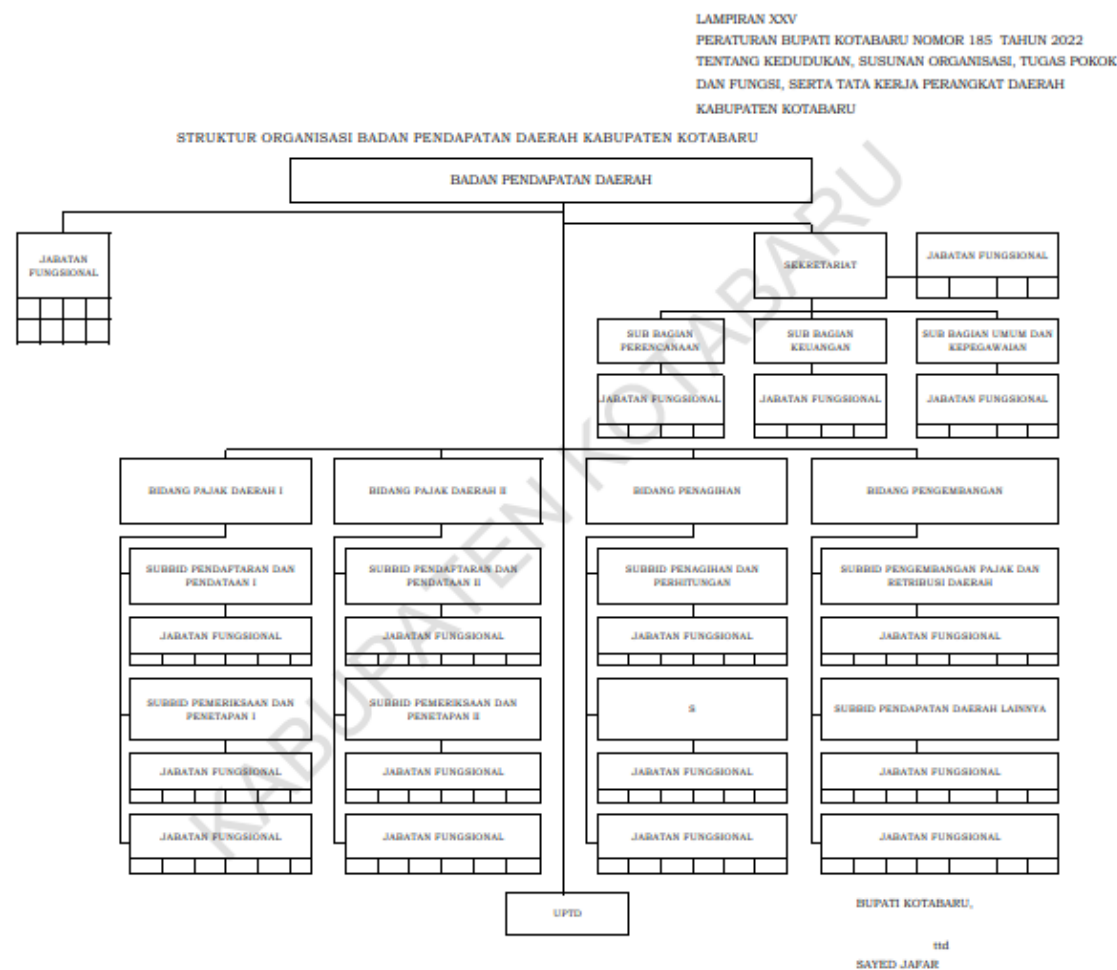
- 1) Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program / kegiatan di Bidang Pajak Daerah I;
- 4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program / kegiatan di Bidang Pajak Daerah II;
- 5) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program / kegiatan di Bidang Penagihan;
- 6) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program / kegiatan di bidang Pengembangan;
- 7) Penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Penyelenggara pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- 9) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program / kegiatan di UPTD; dan
- 10) Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
3. Melaksanakan kewenangan selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah sesuai kewenangan yang diserahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;

4. Memberikan informasi dan analisis capaian target pendapatan dan rencana anggaran pendapatan;
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendapatan asli daerah;
6. Menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Badan;
7. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja program / kegiatan pengelolaan kesekretariatan badan;
8. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang Pajak Daerah I;
9. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang Pajak Daerah I;
10. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang Penagihan;
11. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di Bidang Pengembangan;
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait pelayanan di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
13. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dengan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
14. Menyelenggarakan pengendalian internal akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Badan;
15. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja UPTD; dan
16. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi dan unsur-unsur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1.1. Bagan Struktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru memimpin unsur-unsur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru terdiri dari:

1. **Sekretariat** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian;
2. **Bidang Pajak Daerah I** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di Bidang Pajak Daerah I (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Retibusi Daerah) yang meliputi sub pendaftaran dan pendataan I, sub pemeriksaan dan penetapan I dan sub pengolahan data dan informasi I;
3. **Bidang Pajak Daerah II** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pajak daerah II (PBB-P2, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir) yang meliputi sub pendaftaran dan pendataan II, sub pemeriksaan dan penetapan II dan sub pengolahan data dan informasi II;
4. **Bidang Penagihan** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di Bidang Penagihan yang meliputi sub penagihan dan perhitungan, sub pertimbangan dan restitusi dan sub pembukuan, verifikasi dan pelaporan;
5. **Bidang Pengembangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengembangan meliputi sub pengembangan pajak dan retribusi daerah, sub pendapatan daerah lainnya, serta sub pembinaan dan pengawasan.

B. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditentukan Aspek Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai berikut:

- 1) Dengan Sumber Daya Manusia yang handal mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada Wajib Pajak;

- 2) Dengan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Dengan pengadaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak;
- 4) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah melalui sosialisasi secara berkelanjutan.

C. KONDISI UMUM (Permasalahan Utama)

Sedangkan permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan;
- 4) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah;
- 5) Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

D. SISTEMATIKA

Kinerja pemungutan pajak pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua hal yaitu : Pertama, adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya kesadaran dalam membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu komunitas, adanya manfaat yang dapat dirasakan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari membayar pajak dan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

serta *law enforcement*. Kedua, penggalan potensi pajak. Penggalan potensi pajak dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak.

Dimana administrasi pajak (*tax administration*) yang baik harus mampu menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah. Secara teoritis administrasi pajak merupakan operasionalisasi hukum pajak (*tax law*) yang merupakan satu kesatuan sebagai suatu system pajak (*tax system*). Dalam pelaksanaan administrasi pajak dibutuhkan rambu-rambu berupa petunjuk pelaksanaan serta peraturan teknis lainnya sebagai pedoman, baik oleh aparat pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak. Untuk dapat melakukan penggalan pajak yang optimal, maka administrasi perpajakan harus mampu mengadministarsikan penerimaan pajak, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak (baik kepada petugas pajak maupun Wajib Pajak), memberikan pelayanan pajak yang baik, serta adanya persamaan perlakuan kepada semua Wajib Pajak (adil) dalam *law enforcement*.

Efektifitas pemungutan pajak merupakan *output* dan *outcome* dari kegiatan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah untuk menimbulkan efek kepatuhan, serta terpenuhinya pelayanan terhadap hak-hak Wajib Pajak untuk menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap berada dalam tatanam Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dengan mengacu pada Rencana Pemabnagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bapenda

Sasaran :

Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
(Kemandirian Fiskal)

Rumusan sasaran strategis diselaraskan dengan tujuan, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam table 2.1.

Tabel 2.1.

**RUMUSAN SASARAN STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023**

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN RENSTRA
1	2	3	4
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (Kemandirian Fiskal)	Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan

2. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan Strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun salah satu Strategi yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah **Membuat Sketsa potensi daerah berdasarkan geografis agar pembangunan dan pergerakan ekonomi, sosial dan budaya tidak tumpang tindih dan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktunya serta memenuhi hajat hidup orang banyak.**

Sedangkan kebijakan-kebijakan yang diambil yaitu :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS);

- b. Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan ekosistem dan kelestarian alam;
- c. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD;
- d. Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD;
- e. Menekan biaya pemungutan Sumber PAD;
- f. Mempromosikan Kabupaten Kotabaru untuk menarik investor masuk ke Kab.Kotabaru baik level lokal, regional maupun internasional;
- g. Mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru;
- h. Melakukan konsultasi dan pendekatan dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan DAU dan DAK yang proporsional;

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam jangka waktu Tahun 2021-2026 yaitu :

- a. Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- b. Meningkatkan koordinasi baik itu secara internal maupun eksternal dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
- c. Menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Teknis (Bintek) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- d. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan daerah.
- e. Memperkuat sinergitas, penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja Badan secara terintegrasi, kredibel, dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan (*stake holders*)

B. RENCANA KINERJA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2023 telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026. Adapun sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Meningkatkan Rasio Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya yang dapat direalisasikan
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1) Optimalisasi Pendapatan Daerah
 - 2) Penyusunan Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah
 - 3) Sosialisasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah
 - 4) Pemutakhiran data WP dan Pendataan WP
 - 5) Pemeliharaan system aplikasi pajak daerah
 - 6) Pengadaan karcis retribusi
 - 7) Verifikasi penerimaan dan rekonsialisasi pajak daerah
 - 8) Penagihan aktif piutang Pajak Daerah
 - 9) Pemeriksaan atas Keberatan dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah
 - 10) Pemungutan PBB P2
 - 11) Verifikasi BPHTB
 - 12) Monitoring dan Evaluasi alat dan system pencatatan data transaksi usaha wajib pajak
 - 13) Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah

- 14)Penerbitan Sura Ketetapan Pajak Daerah
- 15)Pemeliharaan Sistem Server
- 16)Pendaftaran Wajib Pajak
- 17)Pemeriksaan SPTPD
- 18)Optimalisasi Penagihan pajak daerah
- 19)Perhitungan Pajak Daerah

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 ditetapkan dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam table 2.2.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	-	Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah	8,47%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	-	Presentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah**

Analisis Pencapaian kinerja Bapenda Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja menunjukkan bahwa Bapenda Kabupaten Kotabaru telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bapenda Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.	- Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah	8.47%	8.07%	132.80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Presentase Layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	98.70%	99.06
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2023					115.93

Berdasarkan table 3.1 diatas dapat dikemukakan analisis pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kerjanya sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran :**Meningkatnya Realiasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Dengan indikator :

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah menunjukkan perbandingan Jumlah PAD dengan jumlah Pendapatan pada APBD, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Jumlah Pendapatan Daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan pendapatan asli daerah dalam melaksanakan kemandirian fiskal. Berikut table presentase realisasi PAD dalam 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 3.3 Presentase Realisasi PAD dengan Target PAD

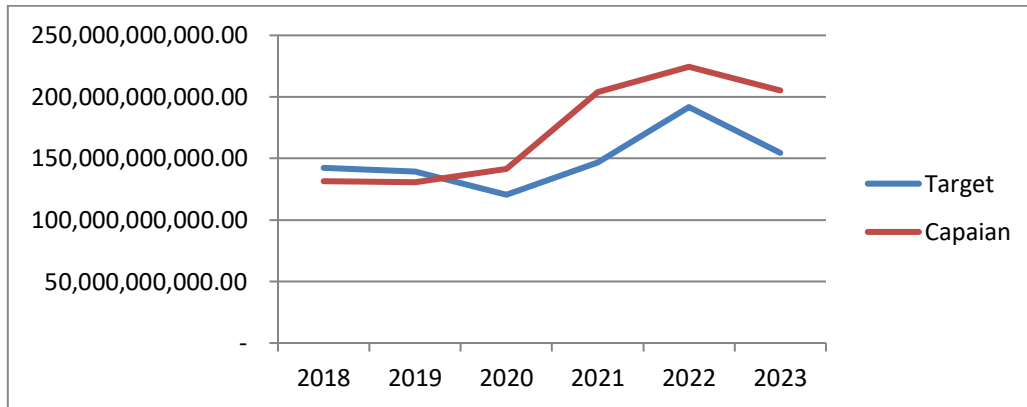
No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target PAD Tahun n	Realisasi PAD Tahun n	Rasio Capaian
1	2	3	5	4	6
1	Rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah	2019	139,332,368,647.41	130,665,705,449.80	93.78%
		2020	120,471,594,319.00	141,676,176,118.00	117.60%
		2021	146,627,106,186.00	203,829,658,710.57	139.01%
		2022	191,724,593,852.00	224,475,812,713.93	117.08%
		2023	154,466,225,503.00	205,136,814,891.96	132.80%

**Tabel 3.4. Presentse Realisasi Pendapatan Asli Daerah
terhadap Total Pendapatan Selama 5 Tahun**

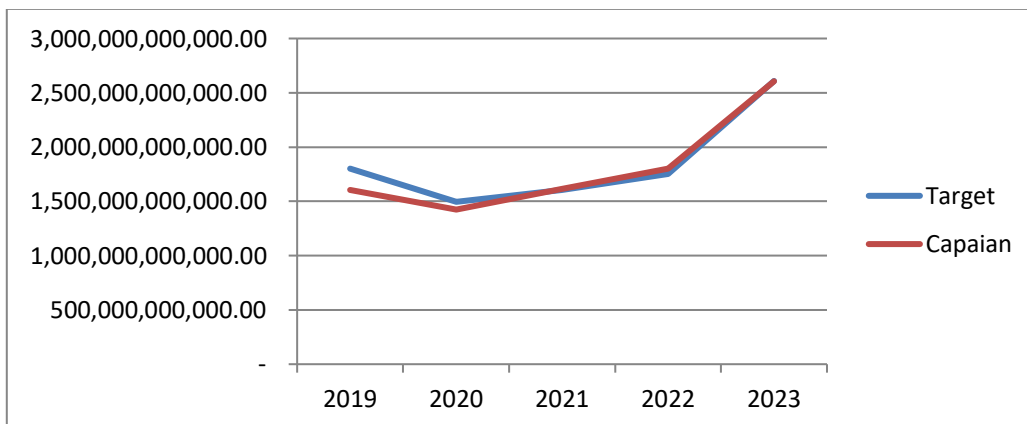
No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target Pendapatan Daerah		Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Capaian	Realisasi PAD Tahun n	Presentase Realisasi (%)
1	2	3	5		4	6	6	7
1	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan	2019	1,799,059,262,619.18	80%	1,605,394,538,148.80	89.24%	130,665,705,449.80	8.14
		2020	1,495,508,818,087.00	85%	1,424,115,083,913.02	95.23%	141,676,176,118.00	9.95
		2021	1,604,419,342,537.00	85%	1,614,194,636,676.00	100.61%	203,829,658,710.57	12.63
		2022	1,754,253,119,693.00	85%	1,802,336,442,533.93	102.74%	224,475,812,713.93	12.45
		2023	2,608,583,300,871.00	85%	2,605,991,219,608.96	99.90%	202,618,101,464.56	7.87

Grafik 3.1.

Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah s.d. Tahun 2023



Grafik 3.2. Presentse Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan s.d. Tahun 2023



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Dengan indikator :

Presentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP

Presentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai dengan SOP dengan penyusunan perubahan SOP tentang pelayanan pajak dan retribusi daerah agar lebih efisien dalam melaksanakan pelayanan terhadap wajib pajak.

B. Capaian Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Kotabaru, Bapenda Kabupaten Kotabaru melaksanakan 2 Program Prioritas yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 2 Kegiatan Prioritas yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
2. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Hasil Pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

1. Pendaftaran objek Pajak Daerah dengan tujuan terdatanya dan terdaftarnya wajib pajak baru untuk mendapatkan NPWPD dengan target wajib pajak baru sebanyak 1.000 wajib pajak PHR dan wajib pajak PAT, serta Pemuktakhiran data wajib pajak dan pendataan wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir dengan target terlaksananya pemuktakhiran data wajib pajak.
2. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah berupa pemeliharaan system aplikasi pajak daerah dengan tujuan terpeliharanya system terhadap 10 jenis pajak dan pemeliharaan alat serta system monitoring transaksi pajak online dengan tujuan terpeliharanya system monitoring pajak online typing box agar terwujudnya penerimaan pajak secara online secara maksimal.
3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap 1.000 SPPT PBBP2 serta verifikasi BPHTB sebanyak 1.000 wajib pajak.
4. Penilaian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah berupa pemeriksaan atas keberatan nilai SKPD oleh wajib pajak terhadap 7 wajib pajak dapat terlayani.

5. Penagihan Pajak Daerah berupa pelaksanaan optimalisasi penagihan pajak daerah dengan tujuan terlaksananya optimalisasi penagihan pajak daerah terhadap 40 wajib pajak dengan untuk meminimalisasi piutang pajak.
6. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah berupa pemeriksaan pajak daerah dengan tujuan terlaksananya pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dilakukan terhadap Wajib pajak.
7. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah berupa optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain dengan tujuan terselenggaranya optimalisasi pendapatan dari penerimaan lain-lain.

C. Realisasi Keuangan/Anggaran

Kondisi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 24.657.321.684,00 terealisasi sebesar Rp. 20.180.245.615,00 atau 81,84%. Secara lebih rinci realisasi anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5.

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah TA. 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Kegiatan (Kinerja)				Kegiatan (Anggaran)		
			Satuan	Rencana	Capaian	%	Rencana	Capaian	%
	BELANJA					99.06	24,657,321,684	20,180,245,615	81.84
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					98.70	17,884,586,997	14,392,532,902	80.47
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100.00	275,947,442	202,257,234	73.30

Laporan Kinerja Tahun 2023

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100.00	71,735,506	54,205,834	75.56
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kali Koordinasi	2	2	100.00	43,954,536	31,852,000	72.47
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kali Koordinasi	2	2	100.00	21,081,088	15,580,100	73.91
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kali Koordinasi	2	2	100.00	44,324,132	34,592,500	78.04
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kali Koordinasi	2	2	100.00	21,101,945	15,058,300	71.36
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	100.00	47,468,071	34,504,700	72.69
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	100.00	26,282,164	16,463,800	62.64
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100.00	13,369,795,272	10,622,992,078	79.46
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kali Penyediaan	13	13	100.00	12,469,439,740	9,866,546,816	79.13

Laporan Kinerja Tahun 2023

9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kali Pembayaran	12	12	100.00	580,246,952	477,721,226	82.33
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kali Pelaksanaan	12	12	100.00	187,046,027	168,085,667	89.86
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kali Koordinasi	1	1	100.00	86,712,257	82,509,640	95.15
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kali Koordinasi	1	1	100.00	15,347,432	15,345,079	99.98
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	2	2	100.00	7,499,922	7,496,550	99.96
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	4	4	100.00	20,499,744	2,287,100	11.16

Laporan Kinerja Tahun 2023

15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100.00	3,003,198	3,000,000	99.89
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					81.62	244,679,219	173,811,792	71.04
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan	4	4	100.00	70,620,000	68,600,000	97.14
17	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kali Pendataan	12	12	100.00	17,499,799	15,299,420	87.43
18	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kali Koordinasi	12	12	100.00	20,499,976	16,694,900	81.44
19	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kali Monitoring	12	12	100.00	16,903,732	15,041,200	88.98
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali Pelaksanaan	4	4	100.00	29,190,712	15,656,600	53.64
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	10	50.00	89,965,000	42,519,672	47.26

Laporan Kinerja Tahun 2023

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				99.14	1,372,083,818	1,148,662,051	83.72
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kali Penyediaan	4	4	100.00	88,719,500	65,632,350	73.98
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kali Penyediaan	12	12	100.00	112,348,032	108,167,903	96.28
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kali Penyediaan	12	12	100.00	268,900,000	193,725,000	72.04
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kali Penyediaan	12	12	100.00	268,475,000	244,828,625	91.19
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kali	36	19	52.78	10,920,000	3,120,000	28.57
27	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kali Penyediaan	6	5	83.33	39,650,000	26,230,000	66.15
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang Kali	72	72	100.00	483,812,000	452,459,773	93.52

Laporan Kinerja Tahun 2023

29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	97.36	4,261,118	4,258,200	99.93
30	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kali Pelaksanaan	4	4	100.00	94,998,168	50,240,200	52.89
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					94.72	1,419,182,000	1,338,453,000	94.31
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	10	10	100.00	1,344,182,000	1,338,453,000	99.57
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kali pengadaan	1	0	0.00	75,000,000	-	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98.18	633,034,232	591,231,930	93.40
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	1200	870	72.50	6,300,000	4,500,000	71.43
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kali Pembayaran	144	137	95.14	200,987,540	175,987,130	87.56

Laporan Kinerja Tahun 2023

35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kali Penyediaan	12	12	100.00	425,746,692	410,744,800	96.48
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				84.49	569,865,014	315,124,817	55.30
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	24	18	90.91	143,392,600	80,505,582	56.14
37	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	24	21	90.91	403,625,469	216,839,235	53.72

Laporan Kinerja Tahun 2023

38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kali	11	10	90.91	22,846,945	17,780,000	77.82
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					100.00	315,300,000	312,179,774	99.01
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					100.00	315,300,000	312,179,774	99.01
39	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12	100.00	315,300,000	312,179,774	99.01
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					100.00	6,457,434,687	5,475,532,939	84.79
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					100.00	6,457,434,687	5,475,532,939	84.79
40	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	2	2	100.00	125,430,387	96,921,912	77.27
41	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen	4	4	100.00	627,717,705	585,886,170	93.34
42	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	12	12	100.00	347,979,800	204,282,000	58.71

Laporan Kinerja Tahun 2023

43	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	3	3	100.00	1,031,821,500	971,709,140	94.17
44	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	laporan	12	12	100.00	357,235,794	206,442,987	57.79
45	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	12	12	100.00	635,181,720	497,022,756	78.25
46	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Objek Pajak	1000	1000	100.00	865,065,252	764,861,002	88.42
47	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100.00	233,124,557	216,665,872	92.94
48	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	7500	7500	100.00	584,059,809	461,325,413	78.99
49	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100.00	214,541,786	208,593,754	97.23

50	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100.00	357,935,831	313,011,746	87.45
51	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100.00	277,090,900	265,685,220	95.88
52	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dari pengawasan pajak daerah	Dokumen	12	12	100.00	199,996,792	149,534,839	74.77
53	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	laporan	12	12	100.00	206,072,854	158,031,609	76.69
54	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	laporan	4	4	100.00	394,180,000	375,558,519	95.28

D. INOVASI

Inovasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran sesuai Renstra Bapenda Kabupaten Kotabaru 2021-2026 meliputi :

1. **SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak)**
2. **SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)**
3. **BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)**
4. **AMPLANG (Aplikasi Membayar Pajak Langsung)**

Rencana Kedepan :

1. **Membangun SmartGov agar semua data dapat terintegrasi**
2. **Mengembangkan aplikasi AMPLANG**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) terlihat dalam pengukuran pencapaian kinerja yang signifikan sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang. Terhadap 1 (Satu) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan baik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai langkah-langkah pencapaian visi, misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada hakekatnya adalah proses terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, dapat disimpulkan bahwa :

Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan dengan capaian sebesar 7,87%. Sementara Indikator Kinerja Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar 132,80%, demikian untuk masing-masing indikator telah memperoleh interpretasi **Memuaskan**, Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023

dengan Rata-rata Capaian Kinerja Program sebesar 99,06% dan Realisasi anggaran mencapai 81,84%.

2. Saran

Saran terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 adalah terhadap indikator yang capaiannya sudah mencapai target dan bahkan melampaui target diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk mempertahankan dan meningkatkan proses perencanaan dan pelaksanaannya sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik pada Tahun berikutnya.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dan memberikan gambaran dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2023, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

Kotabaru, Januari 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru



RONNY HENDRAYADI, SE, M.IP
NIP. 19761010 200901 1 002
Pembina (IV/a)

LAMPIRAN

LAPORAN RELISASI PENERIMAAN PENDAPATAN
PER RINCIAN OBYEK PENDAPATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
PERIODE : 01 JANUARI S/D 31 DECEMBER 2023

KODE REKENING								URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2023	PENERIMAAN			%	JUMLAH LEBIH/ (KURANG)	KET
										PERIODE		S/D TANGGAL			
										01/01/2023 S/D 30/11/2023	01/12/2023 S/D 31/12/2023	31/12/2023			
1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	x	x	xx	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.466.225.503,00	178.407.854.727,85	32.490.697.692,05	210.898.452.419,90	136,53	56.432.226.916,90	
4	x	x	xx	1	1			PAJAK DAERAH	75.738.668.873,00	61.305.467.030,00	8.633.210.382,00	69.938.677.412,00	92,34	(5.799.991.461,00)	
4	4	04	04	1	1			BADAN PENDAPATAN DAERAH	75.738.668.873,00	61.305.467.030,00	8.633.210.382,00	69.938.677.412,00	92,34	(5.799.991.461,00)	
4	4	04	04	1	1	01		PAJAK HOTEL	608.716.323,00	608.918.821,00	11.118.182,00	620.037.003,00	102,20	13.320.680,00	
4	4	04	04	1	1	01	08	Pajak Hotel	581.716.323,00	571.871.692,00	10.868.182,00	582.739.874,00	100,18	1.023.551,00	
4	4	04	04	1	1	01	12	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	25.000.000,00	37.047.129,00	250.000,00	37.297.129,00	149,19	12.297.129,00	
4	4	04	04	1	1	02		PAJAK RESTORAN	7.275.398.413,00	9.202.948.643,00	1.411.646.887,00	10.614.595.530,00	145,90	3.339.197.117,00	
4	4	04	04	1	1	02	01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.288.398.413,00	4.256.887.868,00	1.042.318.604,00	5.299.206.472,00	161,15	2.010.808.059,00	
4	4	04	04	1	1	02	02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	375.000.000,00	317.499.789,00	12.597.638,00	330.097.427,00	88,03	(44.902.573,00)	
4	4	04	04	1	1	02	03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	7.000.000,00	2.998.900,00	-	2.998.900,00	42,84	(4.001.100,00)	
4	4	04	04	1	1	02	05	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.300.000.000,00	4.312.965.986,00	341.431.745,00	4.654.397.731,00	141,04	1.354.397.731,00	
4	4	04	04	1	1	02	06	Pajak Warung dan Sejenisnya	305.000.000,00	312.596.100,00	15.298.900,00	327.895.000,00	107,51	22.895.000,00	
4	4	04	04	1	1	03		PAJAK HIBURAN	144.000.000,00	150.391.614,00	29.532.145,00	179.923.759,00	124,95	35.923.759,00	
4	4	04	04	1	1	03	01	Pajak Tontonan Film	60.000.000,00	75.215.000,00	22.874.000,00	98.089.000,00	163,48	38.089.000,00	
4	4	04	04	1	1	03	07	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	56.000.000,00	55.692.671,00	3.750.600,00	59.443.271,00	106,15	3.443.271,00	
4	4	04	04	1	1	03	10	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.000.000,00	3.445.800,00	-	3.445.800,00	114,86	445.800,00	
4	4	04	04	1	1	03	13	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	4.000.000,00	2.270.961,00	-	2.270.961,00	56,77	(1.729.039,00)	
4	4	04	04	1	1	03	14	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)	13.500.000,00	2.143.182,00	189.545,00	2.332.727,00	17,28	(11.167.273,00)	
4	4	04	04	1	1	03	18	Pajak Pusat Kebugaran	-	6.985.000,00	2.598.000,00	9.583.000,00	-	9.583.000,00	
4	4	04	04	1	1	03	19	Pajak Pertandingan Olahraga	7.500.000,00	4.639.000,00	120.000,00	4.759.000,00	63,45	(2.741.000,00)	
4	4	04	04	1	1	04		PAJAK REKLAME	350.000.000,00	371.097.764,00	1.453.500,00	372.551.264,00	106,44	22.551.264,00	
4	4	04	04	1	1	04	01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	325.000.000,00	327.516.052,00	900.000,00	328.416.052,00	101,05	3.416.052,00	
4	4	04	04	1	1	04	02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	43.581.712,00	553.500,00	44.135.212,00	176,54	19.135.212,00	
4	4	04	04	1	1	05		PAJAK PENERANGAN JALAN	23.133.013.429,00	23.329.237.142,00	2.485.596.988,00	25.814.834.130,00	111,59	2.681.820.701,00	
4	4	04	04	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PPJ PLN)	20.880.993.153,00	21.040.846.441,00	2.138.530.715,00	23.179.377.156,00	111,01	2.298.384.003,00	
4	4	04	04	1	1	05	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ NON PLN)	2.252.020.276,00	2.288.390.701,00	347.066.273,00	2.635.456.974,00	117,03	383.436.698,00	
4	4	04	04	1	1	06		PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	22.389.353.576,00	19.973.744.680,00	2.140.782.500,00	22.114.527.180,00	98,77	(274.826.396,00)	
4	4	04	04	1	1	06	04	Pajak Batu Kapur	17.750.534.560,00	14.765.947.812,00	1.325.612.596,00	16.091.560.408,00	90,65	(1.658.974.152,00)	
4	4	04	04	1	1	06	06	Pajak MBL Batu Gunung	-	1.539.707.788,00	42.861.474,00	1.582.569.262,00	-	1.582.569.262,00	
4	4	04	04	1	1	06	08	Pajak MBL Pasir dan Kerikil	1.663.004.520,00	1.462.269.976,00	601.678.785,00	2.063.948.761,00	124,11	400.944.241,00	
4	4	04	04	1	1	06	09	Pajak MBL Tanah Timbun/Urug	-	1.807.465.628,00	82.851.380,00	1.890.317.008,00	-	1.890.317.008,00	
4	4	04	04	1	1	06	32	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) / Laterit	968.160.000,00	398.353.476,00	87.778.265,00	486.131.741,00	50,21	(482.028.259,00)	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	04	1	1	06	33	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.007.654.496,00						
4	4	04	04	1	1	07		Pajak Parkir	110.187.132,00	99.881.850,00	12.563.700,00	112.445.550,00	102,05	(2.007.654.496,00)	
4	4	04	04	1	1	07	01	Pajak Parkir	110.187.132,00	99.881.850,00	12.563.700,00	112.445.550,00	102,05	2.258.418,00	
4	4	04	04	1	1	08		PAJAK AIR BAWAH TANAH	30.000.000,00	18.548.859,00	12.427.376,00	30.976.235,00	103,25	2.258.418,00	
4	4	04	04	1	1	08	01	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	18.548.859,00	12.427.376,00	30.976.235,00	103,25	976.235,00	
4	4	04	04	1	1	09		PAJAK SARANG BURUNG WALET	1.200.000.000,00	701.260.200,00	2.237.000,00	703.497.200,00	58,62	976.235,00	
4	4	04	04	1	1	09	01	Pajak Sarang Burung Walet	1.200.000.000,00	701.260.200,00	2.237.000,00	703.497.200,00	58,62	(496.502.800,00)	
4	4	04	04	1	1	11		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN	2.500.000.000,00	2.984.629.265,00	47.631.804,00	3.012.261.069,00	120,49	(496.502.800,00)	
4	4	04	04	1	1	11	00	PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan	2.500.000.000,00	2.984.629.265,00	47.631.804,00	3.012.261.069,00	120,49	512.261.069,00	
4	4	04	04	1	1	12		BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	18.000.000.000,00	3.884.808.192,00	2.478.220.300,00	6.363.028.492,00	35,35	512.261.069,00	
4	4	04	04	1	1	12	01	BPHTB - Pemindahan Hak	16.307.600.300,00	1.172.200.494,00	162.615.200,00	1.334.815.694,00	8,19	(11.638.971.508,00)	
4	4	04	04	1	1	12	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	1.692.399.700,00	2.712.607.698,00	2.315.605.100,00	5.028.212.798,00	297,11	(14.972.784.606,00)	
4	x	x	xx	1	2			RETRIBUSI DAERAH	7.416.050.505,00	6.924.522.575,00	1.029.457.943,00	7.953.980.518,00	107,25	3.335.813.098,00	
4	1	02	01	1	2			DINAS KESEHATAN	1.100.000.000,00	1.172.541.088,00	123.902.698,00	1.296.443.682,00	117,86	637.930.013,00	
4	1	02	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	1.000.000.000,00	1.069.227.086,00	109.009.096,00	1.178.236.182,00	117,82	196.443.682,00	
4	1	02	01	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.069.227.086,00	109.009.096,00	1.178.236.182,00	117,82	178.236.182,00	
4	1	02	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	100.000.000,00	103.314.000,00	14.893.500,00	118.207.500,00	118,21	178.236.182,00	
4	1	02	01	1	2	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	100.000.000,00	103.314.000,00	14.893.500,00	118.207.500,00	118,21	18.207.500,00	
4	1	03	03	1	2			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	757.500.000,00	1.104.659.800,00	349.200.000,00	1.453.859.800,00	191,93	696.359.800,00	
4	1	03	03	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM		-			-		
4	1	03	03	1	2	01	37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (GARIS)		-			-		
4	1	03	03	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	250.000.000,00	315.300.000,00	341.400.000,00	656.700.000,00	262,68		
4	1	03	03	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	315.300.000,00	341.400.000,00	656.700.000,00	262,68	406.700.000,00	
4	1	03	03	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	507.500.000,00	789.359.800,00	7.800.000,00	797.159.800,00	157,08	406.700.000,00	
4	1	03	03	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	788.544.800,00	7.800.000,00	796.344.800,00	159,27	289.659.800,00	
4	1	03	03	1	2	03	09	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	7.500.000,00	815.000,00	-	815.000,00	10,87	296.344.800,00	
4	2	01	01	1	2			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20.000.000,00	19.250.000,00	1.200.000,00	20.450.000,00	102,25	(6.685.000,00)	
4	2	01	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	20.000.000,00	19.250.000,00	1.200.000,00	20.450.000,00	102,25	450.000,00	
4	2	01	01	1	2	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	20.000.000,00	19.250.000,00	1.200.000,00	20.450.000,00	102,25	450.000,00	
4	2	01	01	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		-			-		
4	2	01	01	1	2	03	12	Retribusi Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Asing-LRA		-			-		
4	2	05	01	1	2			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	105.000.000,00	86.275.000,00	6.650.000,00	92.925.000,00	88,50		
4	2	05	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	105.000.000,00	86.275.000,00	6.650.000,00	92.925.000,00	88,50	(12.075.000,00)	
4	2	05	01	1	2	01	07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	105.000.000,00	86.275.000,00	6.650.000,00	92.925.000,00	88,50	(12.075.000,00)	
4	2	09	01	1	2			DINAS PERHUBUNGAN	1.428.500.000,00	1.027.803.500,00	125.183.000,00	1.152.986.500,00	80,71	(12.075.000,00)	
4	2	09	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	650.000.000,00	448.515.500,00	73.212.000,00	519.727.500,00	79,96	(275.513.500,00)	
4	2	09	01	1	2	01	19	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250.000.000,00	232.548.500,00	49.827.000,00	282.375.500,00	112,95	(130.272.500,00)	
4	2	09	01	1	2	01	27	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	400.000.000,00	213.967.000,00	23.385.000,00	237.352.000,00	59,34	32.375.500,00	
4	2	09	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	743.500.000,00	570.488.000,00	51.771.000,00	622.259.000,00	83,69	(162.648.000,00)	
4	2	09	01	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	38.193.500,00	4.500.000,00	42.693.500,00	85,39	(121.241.000,00)	
4	2	09	01	1	2	02	13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	15.000.000,00	9.301.000,00	2.025.000,00	11.326.000,00	75,51	(7.306.500,00)	
4	2	09	01	1	2	02	14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	7.500.000,00	6.500.000,00	700.000,00	7.200.000,00	96,00	(3.674.000,00)	

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	2	09	01	1	2	02	16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	571.000.000,00	440.998.500,00	35.838.000,00	476.634.500,00	83,47	(94.365.500,00)	
4	2	09	01	1	2	02	20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	100.000.000,00	75.497.000,00	8.908.000,00	84.405.000,00	84,41	(15.595.000,00)	
4	2	09	01	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	35.000.000,00	10.800.000,00	200.000,00	11.000.000,00	31,43	(24.000.000,00)	
4	2	09	01	1	2	03	06	Retribusi Pemberian Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	35.000.000,00	10.800.000,00	200.000,00	11.000.000,00	31,43	(24.000.000,00)	
4	2	11	01	1	2			DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.437.728.985,00	2.228.252.019,00	254.784.387,00	2.483.036.406,00	101,86	45.307.421,00	
4	2	11	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	462.000.000,00	434.566.394,00	52.035.803,00	486.602.197,00	105,33	24.602.197,00	
4	2	11	01	1	2	01	07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	96.000.000,00	87.725.000,00	9.445.000,00	97.170.000,00	101,22	1.170.000,00	
4	2	11	01	1	2	01	22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	266.000.000,00	260.223.944,00	26.004.703,00	286.228.647,00	107,60	20.228.647,00	
4	2	11	01	1	2	01	45	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya	100.000.000,00	86.617.450,00	16.586.100,00	103.203.550,00	103,20	3.203.550,00	
4	2	11	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	1.975.728.985,00	1.793.685.625,00	202.748.584,00	1.996.434.209,00	101,05	20.705.224,00	
4	2	11	01	1	2	02	01	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	48.000.000,00	55.788.000,00	5.644.000,00	61.432.000,00	127,98	13.432.000,00	
4	2	11	01	1	2	02	05	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/ Pertokoan yang dikontrakan	1.697.328.985,00	1.530.177.625,00	169.804.584,00	1.699.982.209,00	100,16	2.653.224,00	
4	2	11	01	1	2	02	16	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	230.400.000,00	207.720.000,00	27.300.000,00	235.020.000,00	102,01	4.620.000,00	
4	3	01	01	1	2			DINAS PERIKANAN	171.671.520,00	128.647.920,00	11.319.960,00	139.967.880,00	81,58	(31.603.640,00)	
4	3	01	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	171.671.520,00	128.647.920,00	11.319.960,00	139.967.880,00	81,58	(31.603.640,00)	
4	3	01	01	1	2	02	26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Bibit atau Benih Ikan)	108.000.000,00	92.867.400,00	-	92.867.400,00	85,99	(15.132.600,00)	
4	3	01	01	1	2	02	33	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan - Fasilitas Lainnya di Lingkungan TPI	63.571.520,00	35.780.520,00	11.319.960,00	47.100.480,00	74,09	(16.471.040,00)	
4	3	02	02	1	2			DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.375.750.000,00	1.114.827.000,00	147.798.000,00	1.262.625.000,00	91,78	(113.125.000,00)	
4	3	02	02	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	1.375.750.000,00	1.114.827.000,00	147.798.000,00	1.262.625.000,00	91,78	(113.125.000,00)	
4	3	02	02	1	2	02	01	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	264.150.000,00	324.940.000,00	54.634.000,00	379.574.000,00	143,70	115.424.000,00	
4	3	02	02	1	2	02	16	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	32.102.000,00	10.164.000,00	42.266.000,00	105,67	2.266.000,00	
4	3	02	02	1	2	02	21	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.071.600.000,00	757.785.000,00	83.000.000,00	840.785.000,00	78,46	(230.815.000,00)	
4	4	04	04	1	2			BADAN PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	42.266.250,00	9.420.000,00	51.686.250,00	258,43	31.686.250,00	
4	4	04	04	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	-	-	-	-	-	-	
4	4	04	04	1	2	01	20	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	-	-	-	-	-	-	
4	4	04	04	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	20.000.000,00	42.266.250,00	9.420.000,00	51.686.250,00	258,43	31.686.250,00	
4	4	04	04	1	2	02	01	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	20.000.000,00	42.266.250,00	9.420.000,00	51.686.250,00	258,43	31.686.250,00	
4	4	04	04	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	-	-	-	-	-	
4	4	04	04	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	-	-	-	
4	x	x	xx	1	3			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11.839.290.722,00	11.835.389.546,00	-	11.835.389.546,00	99,97	(3.901.176,00)	
4	4	04	01	1	3			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	11.839.290.722,00	11.835.389.546,00	-	11.835.389.546,00	99,97	(3.901.176,00)	
4	4	04	01	1	3	01		BAGI LABA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSDA/BUMD	11.839.290.722,00	11.835.389.546,00	-	11.835.389.546,00	99,97	(3.901.176,00)	
4	4	04	01	1	3	01	01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Bank KAL-SEL Cabang Kotabaru	11.589.290.722,00	11.589.290.722,00	-	11.589.290.722,00	100,00	-	
4	4	04	01	1	3	01	02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	250.000.000,00	246.098.824,00	-	246.098.824,00	98,44	(3.901.176,00)	
4	x	x	xx	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	59.472.215.403,00	98.342.475.576,85	22.827.929.367,05	121.170.404.943,90	203,74	61.698.189.540,90	
4	1	02	01	1	4			DINAS KESEHATAN	8.000.000.000,00	8.385.837.384,00	1.207.199.698,00	9.593.037.082,00	119,91	1.593.037.082,00	
4	1	02	01	1	4	22		Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.000.000.000,00	8.385.837.384,00	1.207.199.698,00	9.593.037.082,00	119,91	1.593.037.082,00	
4	1	02	01	1	4	22	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.000.000.000,00	6.982.686.984,00	865.848.898,00	7.848.535.882,00	112,12	848.535.882,00	
4	1	02	01	1	4	22	02	Pendapatan Dana JKN Non Kapitasi	1.000.000.000,00	1.403.150.400,00	341.350.800,00	1.744.501.200,00	174,45	744.501.200,00	
4	1	02	02	1	4			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU	40.000.000.000,00	65.222.821.589,07	12.856.096.550,99	78.078.918.140,06	195,20	38.078.918.140,06	
4	1	02	02	1	4	16		Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	40.000.000.000,00	65.222.821.589,07	12.856.096.550,99	78.078.918.140,06	195,20	38.078.918.140,06	

1							2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	1	02	02	1	4	16	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	39.446.760.000,00	55.845.489.130,00	4.692.512.889,00	60.538.001.999,00	153,47	21.091.241.999,00
4	1	02	02	1	4	16	04	Pendapatan Lain-lain BLUD	553.240.000,00	9.377.332.459,07	8.163.583.681,99	17.540.916.141,06	3.170,58	16.987.676.141,06
4	3	03	02	1	4			DINAS PERTANIAN	5.000.000,00			-	-	(5.000.000,00)
4	3	03	02	1	4	01		PENJUALAN ASET DAERAH YANG TAK DIPISAHKAN	5.000.000,00			-	-	(5.000.000,00)
4	3	03	02	1	4	01	16	Penjualan Hasil Peternakan	5.000.000,00			-	-	(5.000.000,00)
4	4	04	01	1	4			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	10.561.300.000,00	23.872.747.351,68	3.851.163.130,74	27.723.910.482,42	262,50	17.162.610.482,42
4	4	04	01	1	4	02		PENERIMAAN JASA GIRO	2.561.300.000,00	5.324.383.324,31	1.165.446.679,65	6.489.830.003,96	253,38	3.928.530.003,96
4	4	04	01	1	4	02	01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	5.260.783.041,25	1.161.349.557,04	6.422.132.598,29	256,89	3.922.132.598,29
4	4	04	01	1	4	02	02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	61.300.000,00	63.600.283,06	4.097.122,61	67.697.405,67	110,44	6.397.405,67
4	4	04	01	1	4	03		PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	5.000.000.000,00	11.676.027.397,25	1.531.849.315,06	13.207.876.712,31	264,16	8.207.876.712,31
4	4	04	01	1	4	03	01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Deposito)	5.000.000.000,00	11.676.027.397,25	1.531.849.315,06	13.207.876.712,31	264,16	8.207.876.712,31
4	4	04	01	1	4	04		TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	2.500.000.000,00	3.834.664.398,89	386.978.038,00	4.221.642.436,89	168,87	1.721.642.436,89
4	4	04	01	1	4	04	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.500.000.000,00	3.834.664.398,89	386.978.038,00	4.221.642.436,89	168,87	1.721.642.436,89
4	4	04	01	1	4	06		PENDAPATAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	500.000.000,00	3.037.672.231,23	766.889.098,03	3.804.561.329,26	760,91	3.304.561.329,26
4	4	04	01	1	4	06	03	Bidang Pekerjaan Umum	500.000.000,00	3.037.672.231,23	766.889.098,03	3.804.561.329,26	760,91	3.304.561.329,26
4	4	04	04	1	4			BADAN PENDAPATAN DAERAH	905.915.403,00	881.089.252,10	4.913.469.987,32	5.774.539.239,42	637,43	4.868.623.836,42
4	4	04	04	1	4	07		PENDAPATAN DENDA PAJAK	13.500.000,00	47.020.333,70	7.723.421,00	54.743.754,70	405,51	41.243.754,70
4	4	04	04	1	4	07	02	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000,00	3.921.532,00	2.070.601,00	5.992.133,00	299,61	3.992.133,00
4	4	04	04	1	4	07	04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	-	-	-	-	-
4	4	04	04	1	4	07	05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	-	-
4	4	04	04	1	4	07	06	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000,00	3.252.515,70	382.806,00	3.635.321,70	242,35	2.135.321,70
4	4	04	04	1	4	07	07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	59.688,00	210.000,00	269.688,00	-	269.688,00
4	4	04	04	1	4	07	08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-	-	-	-
4	4	04	04	1	4	07	12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.000.000,00	39.786.598,00	5.060.014,00	44.846.612,00	448,47	34.846.612,00
4	4	04	04	1	4	09		PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN	200.000.000,00	-	4.896.535.366,00	4.896.535.366,00	2.448,27	4.696.535.366,00
4	4	04	04	1	4	09	01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	200.000.000,00	-	4.896.535.366,00	4.896.535.366,00	2.448,27	4.696.535.366,00
4	4	04	04	1	4	10		PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	60.000.000,00	107.497.428,00	6.549.100,32	114.046.528,32	190,08	54.046.528,32
4	4	04	04	1	4	10	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	60.000.000,00	107.497.428,00	6.549.100,32	114.046.528,32	190,08	54.046.528,32
4	4	04	04	1	4	17		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	632.415.403,00	708.551.490,40	2.662.100,00	709.213.590,40	112,14	76.798.187,40
4	4	04	04	1	4	17	01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	632.415.403,00	708.551.490,40	2.662.100,00	709.213.590,40	112,14	76.798.187,40
4	x	x	xx	2				DANA PERIMBANGAN	2.454.117.075.368,00	2.305.795.050.152,00	95.059.354.565,00	2.400.854.404.717,00	97,83	(53.262.670.651,00)
4	x	x	xx	2	1			BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.292.880.634.826,00	1.252.639.450.440,00	21.688.942.300,00	1.274.328.392.740,00	98,57	(18.552.242.086,00)
4	4	04	01	2	1			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.292.880.634.826,00	1.252.639.450.440,00	21.688.942.300,00	1.274.328.392.740,00	98,57	(18.552.242.086,00)
4	4	04	01	2	1	01		BAGI HASIL PAJAK	64.013.068.000,00	54.528.288.984,00	4.886.361.700,00	59.414.650.684,00	92,82	(4.598.417.316,00)
4	4	04	01	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN PPh Pasal 21	13.815.955.000,00	8.289.573.000,00	-	8.289.573.000,00	60,00	(5.526.382.000,00)
4	4	04	01	2	1	01	02	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	50.197.113.000,00	46.238.715.984,00	4.886.361.700,00	51.125.077.684,00	101,85	927.964.684,00
4	4	04	01	2	1	02		BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.228.867.566.826,00	1.198.111.161.456,00	16.802.580.600,00	1.214.913.742.056,00	98,86	(13.953.824.770,00)
4	4	04	01	2	1	02	02	Bagi Hasil SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.918.857.000,00	575.657.100,00	-	575.657.100,00	30,00	(1.343.199.900,00)
4	4	04	01	2	1	02	05	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara (Royalty)	1.221.036.172.826,00	1.191.622.929.381,00	202.764.600,00	1.191.825.693.981,00	97,61	(29.210.478.845,00)
4	4	04	01	2	1	02	07	Bagi Hasil SDA Perikanan	5.638.599.000,00	5.638.599.000,00	-	5.638.599.000,00	100,00	-

1								2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	01	2	1	02	08	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	273.938.000,00	273.938.000,00	-	273.938.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	1	02	11	Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	-	37.975,00	-	37.975,00	-	37.975,00	
4	4	04	01	2	1	02	12	Dana Bagi Hasil Sawit	-	-	16.599.816.000,00	16.599.816.000,00	-	16.599.816.000,00	
4	x	x	xx	2	2			DANA ALOKASI UMUM	607.614.720.000,00	561.498.585.948,00	32.124.469.748,00	593.623.055.696,00	97,70	(13.991.664.304,00)	
4	4	04	01	2	2			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	607.614.720.000,00	561.498.585.948,00	32.124.469.748,00	593.623.055.696,00	97,70	(13.991.664.304,00)	
4	4	04	01	2	2	01		Dana Alokasi Umum	607.614.720.000,00	561.498.585.948,00	32.124.469.748,00	593.623.055.696,00	97,70	(13.991.664.304,00)	
4	4	04	01	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum	607.614.720.000,00	561.498.585.948,00	32.124.469.748,00	593.623.055.696,00	97,70	(13.991.664.304,00)	
4	x	x	xx	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS	207.332.563.000,00	154.357.444.399,00	22.537.482.917,00	176.894.927.316,00	85,32	(30.437.635.684,00)	
4	4	04	01	2	3			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	207.332.563.000,00	154.357.444.399,00	22.537.482.917,00	176.894.927.316,00	85,32	(30.437.635.684,00)	
4	4	04	01	2	3	01		DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER	51.493.500.000,00	37.878.610.295,00	8.139.502.237,00	47.018.112.532,00	91,31	(4.475.387.468,00)	
4	4	04	01	2	3	01	02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	846.560.000,00			-	-	(846.560.000,00)	
4	4	04	01	2	3	01	21	DAK Fisik Reguler Bidang Jalan	15.536.957.000,00	10.875.869.900,00	3.257.033.999,00	14.132.903.899,00	90,96	(1.404.053.101,00)	
4	4	04	01	2	3	01	31	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - PAUD	586.054.000,00	586.054.000,00	-	586.054.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	01	32	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - SD	2.153.577.000,00	1.620.003.900,00	533.573.100,00	2.153.577.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	01	33	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - SMP	12.575.870.000,00	8.878.109.000,00	3.697.761.000,00	12.575.870.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	01	35	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB - Penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi	1.123.253.000,00	773.195.745,00	433.861.500,00	1.207.057.245,00	107,46	83.804.245,00	
4	4	04	01	2	3	01	39	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Peningkatan kesiapan sistem kesehatan	8.989.363.000,00	8.332.026.850,00	-	8.332.026.850,00	92,69	(657.336.150,00)	
4	4	04	01	2	3	01	44	DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum	4.556.418.000,00	3.189.492.600,00	1.217.272.638,00	4.406.765.238,00	96,72	(149.652.762,00)	
4	4	04	01	2	3	01	45	DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi	5.002.369.000,00	3.501.658.300,00	-	3.501.658.300,00	70,00	(1.500.710.700,00)	
4	4	04	01	2	3	01	50	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengendalian Penyakit	123.079.000,00	122.200.000,00	-	122.200.000,00	99,29	(879.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03		DAK IPD NON FISIK	155.839.083.000,00	116.478.834.104,00	13.397.980.680,00	129.876.814.784,00	83,34	(25.962.248.216,00)	
4	4	04	01	2	3	03	02	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5.374.200.000,00	2.253.888.985,00	-	2.253.888.985,00	41,94	(3.120.311.015,00)	
4	4	04	01	2	3	03	03	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG)	57.560.670.000,00	46.048.535.000,00	8.005.270.500,00	54.053.805.500,00	93,91	(3.506.864.500,00)	
4	4	04	01	2	3	03	04	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (TAMSI)	1.077.250.000,00	861.800.000,00	154.750.000,00	1.016.550.000,00	94,37	(60.700.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	05	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	506.886.000,00	405.508.800,00	39.303.380,00	444.812.180,00	87,75	(62.073.820,00)	
4	4	04	01	2	3	03	09	DAK Non Fisik BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.666.300.000,00	899.150.000,00	-	899.150.000,00	53,96	(767.150.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	11	DAK Non Fisik Dana Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM	369.370.000,00	366.930.000,00	-	366.930.000,00	99,34	(2.440.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	13	DAK Non Fisik dana fasilitasi penanaman modal	480.000.000,00	457.021.000,00	-	457.021.000,00	95,21	(22.979.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	14	DAK Non Fisik dana ketahanan pangan dan pertanian	756.650.000,00	756.642.500,00	-	756.642.500,00	100,00	(7.500,00)	
4	4	04	01	2	3	03	16	DAK Non Fisik BOK dan BOKB - Akreditasi puskesmas	34.736.221.000,00	18.813.930.100,00	5.198.656.800,00	24.012.586.900,00	69,13	(10.723.634.100,00)	
4	4	04	01	2	3	03	18	DAK Non Fisik BOK dan BOKB - Bantuan operasional keluarga berencana	6.930.198.000,00	4.519.059.724,00	-	4.519.059.724,00	65,21	(2.411.138.276,00)	
4	4	04	01	2	3	03	19	DAK Non Fisik BOS Reguler	43.597.400.000,00	38.651.367.995,00	-	38.651.367.995,00	88,66	(4.946.032.005,00)	
4	4	04	01	2	3	03	20	DAK Non Fisik BOS Kinerja	2.445.000.000,00	2.445.000.000,00	-	2.445.000.000,00	100,00	-	
4	4	04	01	2	3	03	22	DAK Non Fisik-BOKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00			-	-	(338.918.000,00)	
4	x	x	xx	2	4			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	161.623.062.000,00	148.500.282.400,00	18.708.459.600,00	167.208.742.000,00	103,46	5.585.680.000,00	
4	4	04	01	2	4			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	161.623.062.000,00	148.500.282.400,00	18.708.459.600,00	167.208.742.000,00	103,46	5.585.680.000,00	
4	4	04	01	2	4	01		DANA PENYESUAIAN	161.623.062.000,00	148.500.282.400,00	18.708.459.600,00	167.208.742.000,00	103,46	5.585.680.000,00	
4	4	04	01	2	4	01	00	Dana Desa (DD)	161.623.062.000,00	148.500.282.400,00	18.708.459.600,00	167.208.742.000,00	103,46	5.585.680.000,00	
4	x	x	xx	2	6				184.666.095.542,00	188.799.286.965,00	-	188.799.286.965,00	102,24	4.133.191.423,00	
4	4	04	01	2	6			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	184.666.095.542,00	188.799.286.965,00	-	188.799.286.965,00	102,24	4.133.191.423,00	

1							2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	01	2	6	01	01	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	184.666.095.542,00	188.799.286.965,00	-	188.799.286.965,00	102,24	4.133.191.423,00
4	4	04	01	2	6	01	01	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	20.841.455.242,00	11.969.808.069,00	-	11.969.808.069,00	57,43	(8.871.647.173,00)
4	4	04	01	2	6	01	02	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.129.826.914,00	13.857.549.681,00	-	13.857.549.681,00	68,84	(6.272.277.233,00)
4	4	04	01	2	6	01	03	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	128.333.519.804,00	145.784.543.266,00	-	145.784.543.266,00	113,60	17.451.023.462,00
4	4	04	01	2	6	01	04	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.560.458,00	570.594.272,00	-	570.594.272,00	189,84	270.033.814,00
4	4	04	01	2	6	01	05	Bagi Hasil Pajak Rokok	15.060.733.124,00	16.616.791.677,00	-	16.616.791.677,00	110,33	1.556.058.553,00
								JUMLAH PENDAPATAN	2.608.583.300.871,00	2.484.202.904.879,85	127.549.952.257,05	2.611.752.857.136,90	100,12	3.169.556.265,90



Kode Program dan Kegiatan						Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2023	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)	Unit SKPD Penanggung Jawab		
									I		II		III		IV							
1						3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12	15	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	3,003,198	-	-	-	-	1	3,000,000	-	-	1	Dokumen	3,000,000	3,000,000	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				244,679,219		6,466,380.00		10,634,480		21,403,980		135,306,952		173,811,792	173,811,792		
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	4	Pengadaan	70,620,000	-	-	-	-	-	-	4.0	68,600,000	4	Pengadaan	68,600,000	68,600,000	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Kali Pendataan	17,499,799	3	4,636,380.00	1	1,112,080	3	4,560,780	5.0	4,990,180	12	kali pendataan	15,299,420	15,299,420	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Kali Koordinasi	20,499,976	3	1,830,000.00	1	4,515,900	6	6,150,500	2.0	4,198,500	12	kali koordinasi	16,694,900	16,694,900	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Kali Monitoring	16,903,732	3	-	2	5,006,500	2	3,081,100	5.0	6,953,600	12	kali monitoring	15,041,200	15,041,200	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	Kali Pelaksanaan	29,190,712	-	-	-	-	2	7,611,600	2.0	8,045,000	4	Kali Pelaksanaan	15,656,600	15,656,600	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	orang	89,965,000				-	-	-	10.0	42,519,672	10		42,519,672	42,519,672	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,372,083,818		167,918,115.00		37,783,900		629,363,180		313,596,856		1,148,662,051	1,148,662,051.00		
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Kali Penyediaan	88,719,500	-	1,993,700.00	-	-	3	12,251,200	1.0	51,387,450	4	kali penyediaan	65,632,350	65,632,350	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Kali Penyediaan	112,348,032	3	15,716,039.00	1	7,833,900	5	54,110,564	3.0	30,507,400	12	kali penyediaan	108,167,903	108,167,903	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Kali Penyediaan	268,900,000	3	30,525,000.00	1	-	5	108,945,000	3.0	54,255,000	12	kali penyediaan	193,725,000	193,725,000	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Kali Penyediaan	268,475,000	3	-	1	-	5	209,782,625	3.0	35,046,000	12	kali penyediaan	244,828,625	244,828,625	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36	Kali	10,920,000	2	780,000.00	-	260,000	6	1,300,000	11.0	780,000	19	Kali Pembayaran	3,120,000	3,120,000	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan	6	Kali Penyediaan	39,650,000	-	-	-	-	4	24,400,000	1.0	1,830,000	5	kali penyediaan	26,230,000	26,230,000	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Orang Kali	483,812,000	12	106,003,176.00	3	18,614,000	38	207,173,791	19.0	120,668,806	72	Orang Kali	452,459,773	452,459,773	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	4,261,118	3	1,982,700.00	1	-	-	-	8.0	2,275,500	12	dokumen	4,258,200	4,258,200	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Kali Pelaksanaan	94,998,168	1	10,917,500.00	-	11,076,000	1	11,400,000	2.0	16,846,700	4	kali pelaksanaan	50,240,200	50,240,200	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				1,419,182,000		198,634,000.00		-		1,139,819,000		-		1,338,453,000	1,338,453,000.00		
X	XX	01	2.1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	unit	1,344,182,000	10	198,634,000.00				1,139,819,000	-	-	10	Unit	1,338,453,000	1,338,453,000	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Kali Pengadaan	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unit pemeliharaan	-	-	Subbag Perencanaan
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				633,034,232		135,386,917.00		56,503,604		235,239,536		164,101,873		591,231,930	591,231,930		
X	XX	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200	Lembar	6,300,000	220	1,000,000.00	-	-	300	1,500,000	350	2,000,000	870	lembar	4,500,000	4,500,000	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144	Kali Pembayaran	200,987,540	36	36,886,917.00	11	24,003,604	55	71,239,536	35	43,857,073	137	kali pembayaran	175,987,130	175,987,130	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Kali Penyediaan	425,746,692	3	97,500,000.00	1	32,500,000	5	162,500,000	3	118,244,800	12	kali penyediaan	410,744,800	410,744,800	Subbag Umpeg

Kode Program dan Kegiatan					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2023			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)	Unit SKPD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV						
1					3	4	7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12	15	
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp		
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24	Unit	143,392,600	2	7,830,347.00	1	8,902,083	6	20,936,902	9	42,836,250	18	Unit pemeliharaan	80,505,582	80,505,582	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24	Unit	403,625,469	-	-	-	-	4	6,937,500	17	209,901,735	21	Unit pemeliharaan	216,839,235	216,839,235	Subbag Umpeg
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	11	Kali	22,846,945	-	-	-	1,830,000	4	1,380,000	6	14,570,000	10	Kali Pemeliharaan	17,780,000	17,780,000	Subbag Umpeg
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
5	02				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)				6,772,734,687		593,594,019.00		329,940,014		2,565,363,551		2,298,815,129		5,787,712,713		5,787,712,713	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				315,300,000		38,195,811.00		18,576,160		198,406,998		57,000,805		312,179,774		312,179,774	Bidang Pengembangan
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				315,300,000		38,195,811.00		18,576,160		198,406,998		57,000,805		312,179,774		312,179,774	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Asistensi, Sinkronisasi,	Jumlah Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi,	12	Dokumen	315,300,000	3	38,195,811.00	1	18,576,160	6	198,406,998	2	57,000,805	12	Dokumen	312,179,774	312,179,774	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				6,457,434,687		555,398,208.00		311,363,854		2,366,956,553		2,241,814,324		5,475,532,939		5,475,532,939	
5	02	04	2		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				6,457,434,687		555,398,208.00		311,363,854		2,366,956,553		2,241,814,324		5,475,532,939		5,475,532,939	
5	02	04	2	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2	Dokumen	125,430,387		-	-	-	-	8,787,180	2	88,134,732	2	Dokumen	96,921,912	96,921,912	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,	4	Dokumen	627,717,705	1	90,152,120.00	1	3,289,900	1	272,266,250	1	220,177,900	4	Dokumen	585,886,170	585,886,170	Bidang Pengembangan
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	12	laporan	347,979,800	3	18,793,000.00	3	5,417,000	3	138,257,900	3	41,814,100	12	laporan	204,282,000	204,282,000	Bidang Pengembangan
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	3	unit	1,031,821,500	-	17,766,730.00	-	27,046,527	2	295,448,057	1	631,447,826	3	unit	971,709,140	971,709,140	Bidang PD I
5	02	04	2	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	12	laporan	357,235,794	3	67,135,923.00	3	28,135,944	3	67,133,120	3	44,038,000	12	laporan	206,442,987	206,442,987	Bidang PD II
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	12	laporan	635,181,720	3	82,796,996.00	3	88,851,808	3	67,897,103	3	257,476,849	12	laporan	497,022,756	497,022,756	Bidang PD II
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	1000	Objek Pajak	865,065,252	398	69,675,998.00	402	40,915,823	-	537,372,539	200	116,896,642	1,000	Objek Pajak	764,861,002	764,861,002	Bidang PD II
5	02	04	2	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah	12	Dokumen	233,124,557	3	27,076,562.00	3	2,800,000	3	106,141,235	3	80,648,075	12	Dokumen	216,665,872	216,665,872	Bidang PD I
5	02	04	2	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7500	layanan	584,059,809	3	21,109,396.00	1	7,793,116	-	301,144,431	7,496	131,278,470	7,500	layanan	461,325,413	461,325,413	Bidang PD I
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12	Dokumen	214,541,786	3	21,857,275.00	3	29,235,296	3	84,147,332	3	73,353,851	12	Dokumen	208,593,754	208,593,754	Bidang Penagihan

Kode Program dan Kegiatan					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2023		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV							
1					3	4	7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		15	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp			
5	02	04	2	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	357,935,831	3	49,604,411.00	3	33,224,000	3	145,862,817	3	84,320,518	12	Dokumen	313,011,746	313,011,746	Bidang Penagihan
5	02	04	2	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	277,090,900	3	34,435,601.00	3	32,891,037	3	104,976,917	3	93,381,665	12	Dokumen	265,685,220	265,685,220	Bidang Penagihan
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta	12	Dokumen	199,996,792	3	28,094,978.00	3	2,044,000	3	47,209,000	3	72,186,861	12	Dokumen	149,534,839	149,534,839	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak	12	laporan	206,072,854	3	14,720,518.00	3	7,590,603	3	76,241,572	3	59,478,916	12	laporan	158,031,609	158,031,609	Bidang PD I
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi	4	laporan	394,180,000	1	12,178,700.00	1	2,128,800	1	114,071,100	1	247,179,919	4	laporan	375,558,519	375,558,519	Bidang PD I
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						
									24,657,321,684		2,517,143,750.00		1,435,877,319		8,704,663,892		7,522,560,654		20,180,245,615	20,180,245,615		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD berikutnya *) :																						
*) Diisi oleh Kepala Bappeda																						